

Judul : Serap masukan publik: komisi IV DPR geber revisi UU Pangan
Tanggal : Jumat, 28 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Serap Masukan Publik

Komisi IV DPR Geber Revisi UU Pangan

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ditargetkan rampung pada Juni 2026. Wakil Ketua Komisi IV DPR Abdul Kharis Almasyhari memastikan, penyusunan naskah akademik beleid ini bakal melibatkan pakar dari berbagai kampus, akademisi pangan, hingga ahli pangan.

KHARIS menyebutkan, RUU tersebut masih dalam tahap perumusan. "Draf yang beredar saat ini belum final. Kami tetap membuka ruang masukan publik untuk menyesuaikan dinamika isu terbaru," ujarnya, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Kharis menegaskan, ketahanan pangan adalah faktor penentu stabilitas nasional. Jika pasokan beras terganggu dalam hitungan hari saja, gejolak sosial bisa muncul.

"Kalau empat hari saja tidak ada beras, negara pasti ribut. Ketahanan pangan jebol berarti ketahanan negara juga jebol," ucapnya.

Ia juga menyoroti perlunya aturan tegas untuk mencegah praktik

monopoli dalam tata niaga pangan. Tujuannya, melindungi petani agar tidak dirugikan.

Anggota Komisi IV DPR Endang Setyawati Thohari menambahkan, revisi UU Pangan merupakan momentum memperkuat hilirisasi, perlindungan keanekaragaman hayati, hingga revitalisasi lembaga riset pertanian nasional. Ke depan, kebijakan pangan Indonesia harus berbasis keragaman pangan lokal dan hasil riset yang kuat serta terintegrasi.

"Ketahanan pangan tidak harus beras, tetapi mengikuti keragaman pangan lokal sesuai agro-ecological zone di setiap wilayah," ujar Endang.

Agro-ecological zone adalah



Abdul Kharis

pengelompokan wilayah berdasarkan kesamaan karakteristik sumber daya lahan, seperti iklim, topografi, dan tanah.

Endang juga mengingatkan lemahnya perlindungan hukum terhadap sumber daya genetik Indonesia, sehingga banyak plasma nutfah hilang atau diambil pihak asing. "Jangan sampai keanekaragaman hayati kita diambil asing," tegasnya.

Plasma nutfah merupakan

sumber daya genetik yang memuat informasi genetik organisme tanaman, hewan, hingga mikroba dan penting untuk pemuliaan varietas baru yang lebih unggul serta pelestarian keanekaragaman hayati.

Endang turut menyoroti merosotnya peran lembaga riset pertanian, terutama setelah perubahan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) atau Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP). Dulu, peneliti dan penyuluh bekerja terpadu sehingga inovasi langsung diterapkan di tingkat petani.

"Sekarang banyak balai riset yang tidak diberdayakan, termasuk Balai Biogen di Bogor yang menyimpan plasma nutfah unggul. Ini sangat disayangkan," kritiknya.

Ia juga mendorong diversifikasi pangan berbasis komoditas lokal, termasuk tanaman hutan. Banyak komoditas bernilai ekonomi tinggi yang belum digarap

optimal. Indonesia memiliki banyak pangan lokal, seperti sukun, umbi-umbian, hingga korang.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga beras dan memastikan ketersediaan pangan nasional tetap aman. Arahkan Presiden Prabowo Subianto, katanya, menjadi fondasi utama Bulog dalam memastikan kemandirian pangan.

"Kemandirian tersebut merupakan salah satu cita besar menuju Indonesia Emas," ujar Rizal.

Ia menyebut Presiden Prabowo selalu mengingatkan bahwa kemandirian pangan adalah hal paling sentral. Karena itu, Bulog wajib memastikan kebutuhan pokok terpenuhi dengan harga terjangkau dari Sabang sampai Merauke.

Menurutnya, harga gabah di tingkat petani kini berada pada level yang menguntungkan, sehingga kesejahteraan petani meningkat. ■ TIF